

—————

# RANCANGAN AWAL RENJA 2025



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

—————

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa Renja PD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya dokumen Renja PD ini, dapat dilihat sejauh mana kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan semua pihak yang bersifat konstruktif.

Tarempa, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR, SH, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740311 200212 1 005

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>DAFTAR TABEL</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD</b>	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
II.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	25
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	27
II.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Akhir RKPD	29
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b>	42
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	44
III.3 Program dan Kegiatan	45
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	58

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2021	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2021	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	26
Tabel 2.4	Rancangan Awal RKPD Rancangan Akhir Renja 2025	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran	45
Tabel 3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	46
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran rencana kerja lima tahunan berupa Renstra PD sehingga Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Renja Sekretariat Daerah, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

***“Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai Daerah Otonom Maritim yang Berdaya Saing dalam Bidang Perikanan – Kelautan, Pariwisata dan Pertambangan Berlandaskan Iman dan Taqwa”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah;

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Keputusan menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.640/16/SJ Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, Mempertimbangkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2023;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568).
19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

### I.3. MAKSUM DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 mempunyai maksud, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Sekretariat Daerah dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2025.

#### **I.4. SISTEMATIKA**

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program dan kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

##### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

#### II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 60.135.291.521,00 dengan 3 (tiga) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub Kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 49.283.272.912,00 atau 81,95% dari keseluruhan rencana anggaran. Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2023**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
04:01:01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>

4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
<b>04:01:02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan

4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
<b>04.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

**Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah**

Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renstra Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
4.01.01.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota		61.140.000	-	38.768.000	-	-	-	-	
4.01.01.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang tercipta dan yang digunakan	61.140.000	-	38.768.000	-	-	-	-	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan		16.688.262.271		15.951.772.203			20.937.270.801		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.948.092.671	12.696.629.540	15.133.372.203	-	-	20.080.470.801	16.188.656.108	80.62
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	740.170.000	707.460.000	818.400.000	-	-	856.800.000	591.610.000	69.05
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		450.390.200		12.000.000	-	-	113.080.000		
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	369.890.200	198.660.000	12.000.000	-	-	113.080.000	25.563.300	22.61
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.014.742.600		9.215.933.680	-	-	7.415.846.106		

4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.960.000	74.947.620	336.146.680	-	-	425.499.600	214.713.720	50.47
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.514.000	328.357.050	351.168.700	-	-	178.581.544	178.076.923	99.72
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	110.462.000	88.641.800	123.256.000	-	-	104.552.300	103.216.125	98.72
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2.777.042.600	1.759.113.256	2.532.776.300	-	-	2.197.536.144	2.160.679.535	98.32
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan	273.860.000	256.047.000	309.970.000	-	-	264.364.500	244.225.530	92.38
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.668.810.000	1.029.294.896	1.896.820.000	-	-	1.083.709.921	1.050.558.007	96.94
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	2.741.094.000	2.270.321.127	3.665.796.000	-	-	3.161.602.097	3.067.733.946	97.03
4.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.026.800		469.036.310	-	-	1.116.748.500		
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Disediakan	221.103.200	193.740.000	-	-	-	-	-	-
4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	335.923.500	15.999.500	469.036.310	-	-	1.116.748.500	417.450.000	37.38
4.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		9.250.439.392		10.004.578.737	-	-	11.502.044.180		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	557.969.250	443.756.900	199.499.500	-	-	214.758.600	200.644.300	93.44
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.600.066.538	1.018.057.504	1.637.169.455	-	-	1.461.319.640	1,212,402,368	82.97
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.092.403.604	6.899.077.675	8.167.909.782	-	-	9.825.965.940	8,236,038,464	83.82
4.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		2.306.049.266		1.247.585.108	-	-	1.331.240.900		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	723.210.630	483.217.000	527.111.260	-	-	450.496.838	345,677,040	76.73

	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya								
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202.947.500	97.427.000	139.670.000	-	-	152.770.000	130,368,835	68.00
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	199.836.000	-	-	-	-	-	-	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.180.055.136	1.148.787.800	580.803.848	-	-	727.974.062	654,145,529	89.86
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		2.583.282.215		1.275.336.215	-	-	957.869.626		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	194.913.655	161.329.046	194.913.655	-	-	194.913.655	161,329,046	81.73
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	89.538.000	89.465.000	96.942.000	-	-	108.312.911	108,309,378	99.99
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	0
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.278.830.560	288.706.740	963.480.560	-	-	634.643.060	285,000,000	44.91
4.01.01.2.12	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		2.502.698.015		632.201.600		-	629.744.000		
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	139.972.000	139.972.000	152.372.400	-	-	152.372.400	152,056,311	99.79
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	129.991.000	116.446.550	144.114.000	-		144.014.000	144,013,620	99.99
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	999.984.000	715.798.600	335.715.200	-	-	333.357.600	333,340,215	99.99
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>		333.171.500		487.055.700	-	-	458.571.376		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	114.132.200	108.324.882	157.980.000	-	-	161.280.570	135,755,493.00	84.17

4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	93.929.000	56.291.000	154.250.200	-	-	93.990.236	86,184,050.00	91.69
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	125.110.500	118.423.500	174.825.500	-	-	203.300.570	198,134,931.00	97.46
4.01.01.2.14	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		676.876.887		1.380.335.120		-	1.050.942.600		
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	224.646.000	-	455.750.000	-	-	403.144.000	384.894.758	95.47
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	75.406.000	-	270.996.000	-	-	320.212.000	296.766.126	92.68
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	376.824.887	-	653.589.120	-	-	327.586.600	317.368.212	96.88
4.01.02	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>									
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		450.051.000	-	403.313.200	-	-	403.191.600		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	354.213.000	-	262.609.200	-	-	278.574.500	213,374,866	76.60
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	95.838.000	-	140.704.000	-	-	124.617.100	48,920,150	39.26
4.01.02.2.0002	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		9.816.046.250	-	10.396.250.100		-	10.280.473.991		
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5.564.226.250	-	4.106.238.700	-	-	4.760.768.132	3,033,882,670	63.73
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4.251.820.000	-	6.290.011.400	-	-	5.519.705.859	4,859,526,447	88.04
4.01.02.2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		690.154.000		826.285.000		-	918.519.745		

4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	245.559.000	-	342.854.000	-	-	297.794.500	239,439,175	80.40
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tersedianya Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	293.238.000	-	269.630.000	-	-	384.956.100	365,738,053	95.01
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	151.357.000	-	213.801.000	-	-	235.769.145	226,274,863	95.97
4.01.03	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>						-			
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		414.446.500		362.556.100	-	-	702.583.940		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	63.409.500	-	75.327.100	-	-	39.269.770	35,376,961	90.09
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	266.742.000	-	220.632.000	-	-	476.087.770	471,497,262	99.04
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	84.295.000	-	66.597.000	-	-	187.226.400	182,013,748	97.22
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		957.118.000		959.006.940		-	1.756.598.656		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	430.778.000	-	411.916.440	-	-	835.518.856	492,550,473	58.95
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	226.799.000	-	206.547.000	-	-	490.561.600	390,082,223	79.52
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	299.541.000	-	340.543.500	-	-	430.518.200	120,152,000	27.91
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Terkait Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		-	-	182.563.400		-	218.471.650		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,	-	-	40.319.200	-	-	68.944.750	59.853.786	86.81

		Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	--	26.415.100	-	-	66.889.500	62.085.500	92.82
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	-	115.829.100	-	-	82.637.400	74.440.400	90.08

## II.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PD

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam perencanaan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase rumah ibadah atau madrasah yang aktif				65%	71%	75%	79%	82%	65%	-	-							
2.	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah				3%	3%	4%	5%	6%	3%	-	-							
3.	Indeks Reformasi Birokrasi				B (60,1)	B (63,0)	B (67,0)	B (69,0)	BB (71,0)	B (60,1)	B (60,60)	B							
4.	Nilai EKPPD				Tinggi (3,60)	Tinggi (3,70)	Tinggi (3,80)	Tinggi (3,90)	Tinggi (4,10)	Tinggi (3,0176)	Tinggi (3,0176)	(Sedang) 2,6342							
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (82,00)	A (84,00)	A (86,00)	A (88,00)	A (89,00)	B (82,0)	B (80,69)	B ( 85,16 )							
6.	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terealisasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
7.	Presentase OPD yang melaporkan Progres Fisik tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100							
8.	Persentase pelayanan dinas kepada pimpinan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %								
9.	Persentase Produk Hukum yang diharmonisasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%							
10.	Persentase Rasio Ketersediaan daya listrik				99,70%	99,80%	99,90%	100%	100%	99,70%	100 %	100 %							

### **II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;

3. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;

B. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
3. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

C. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (*reward and punishing*), dan kesejahteraan pegawai.
  - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.
  - Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan effisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan open governace dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di Bagian yang ada di Sekretariat Daerah.
3. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi :

1. Fungsi Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah.
2. Fungsi Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas satuan kerja Prangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara dan instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 hanya menitikberatkan pada analisa kebutuhan tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dengan hasil analisa kebutuhan tidak memiliki perbedaan baik dari tolak ukur dan pagu indikatif dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4. Rancangan Awal RKPD Rancangan Renja Sekretariat Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025**

Rancangan RKPD					Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	KKA	12 Bulan	47.720.733.386,00	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	KKA	12 Bulan	52.151.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KKA	12 Bulan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KKA	12 Bulan	41.106.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	22.160.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	22.160.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	12 Bulan	21.500.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	12 Bulan	21.500.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	12 Bulan	660.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	12 Bulan	660.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian Daerah	KKA	12 Bulan	230.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Kepegawaian Daerah	KKA	12 Bulan	230.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	12 Bulan	230.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	12 Bulan	230.000.000,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	3.976.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Administasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	3.976.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KKA	12 Bulan	125.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KKA	12 Bulan	125.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	12 Bulan	215.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	12 Bulan	215.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	12 Bulan	110.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	12 Bulan	110.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	12 Bulan	1.200.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	12 Bulan	1.200.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	12 Bulan	200.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	12 Bulan	200.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	12 Bulan	220.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	12 Bulan	220.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	12 Bulan	1.906.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	12 Bulan	1.906.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	KKK	<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000,00</b>
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KKK	12 Bulan	300.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KKK	12 Bulan	300.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKK	<b>12 Bulan</b>	<b>4.954.733.386,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKK	<b>12 Bulan</b>	<b>10.680.000.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKK	12 Bulan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKK	12 Bulan	150.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKK	12 Bulan	3.052.366.693,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKK	12 Bulan	1.700.000.000,00

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	12 Bulan	2.252.366.693,00,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	12 Bulan	8.830.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	1.315.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	1.115.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	12 Bulan	315.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	12 Bulan	315.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	12 Bulan	150.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	12 Bulan	150.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	12 Bulan	850.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	12 Bulan	650.000.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	780.000.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	780.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	220.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	220.000.000,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	120.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	120.000.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	12 Bulan	20.000.000,00

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	420.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	420.000.000,00
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>490.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>580.000.000,00</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	105.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	160.000.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	100.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	120.000.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	KKA	12 Bulan	285.000.000,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	KKA	12 Bulan	300.000.000,00
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Penataan Organisasi</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Penataan Organisasi</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>490.000.000,00</b>
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	KKA	12 Bulan	450.000.000,00	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	KKA	12 Bulan	105.000.000,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	KKA	12 Bulan	400.000.000,00	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	KKA	12 Bulan	100.000.000,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	KKA	12 Bulan	350.000.000,00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	KKA	12 Bulan	285.000.000,00
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>795.000.000,00</b>
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	KKA	12 Bulan	450.000.000,00	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	KKA	12 Bulan	325.000.000,00

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	KKA	12 Bulan	400.000.000,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	KKA	12 Bulan	270.000.000,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	KKA	12 Bulan	350.000.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	KKA	12 Bulan	200.000.000,00
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>8.875.000.000</b>
Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>320.000.000,00</b>	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>320.000.000,00</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	KKA	12 Bulan	210.000.000,00	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan			210.000.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	KKA	12 Bulan	110.000.000,00	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			110.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>7.400.000.000,00</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KKA	12 Bulan	2.900.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KKA	12 Bulan	2.900.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	KKA	12 Bulan	4.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	KKA	12 Bulan	4.500.000.000,00
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.245.000.000,00</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.155.000.000,00</b>
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	KKA	12 Bulan	400.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	KKA	12 Bulan	400.000.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	KKA	12 Bulan	610.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	KKA	12 Bulan	610.000.000,00

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	KKA	12 Bulan	145.000.000,00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	KKA	12 Bulan	145.000.000,00
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>TERLAKSANANYA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>2.170.000.000,00</b>
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	KKA	12 Bulan	400.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	KKA	12 Bulan	400.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	KKA	12 Bulan	250.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	KKA	12 Bulan	250.000.000,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	KKA	12 Bulan	150.000.000,00	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	KKA	12 Bulan	150.000.000,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>123.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>645.000.000</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	KKA	12 Kali	45.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	KKA	12 Kali	45.000.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	KKA	12 Bulan	600.000.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	KKA	12 Bulan	600.000.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>970.000.000,00</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>970.000.000,00</b>
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	KKA	12 Bulan	420.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	KKA	12 Bulan	420.000.000,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KKA	3 Perda	350.000.000,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KKA	3 Perda	350.000.000,00

Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	KKA	12 Bulan	200.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	KKA	12 Bulan	200.000.000,00
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>155.000.000,00</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	KKA	12 Bulan	50.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	KKA	12 Bulan	50.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	KKA	12 Bulan	51.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	KKA	12 Bulan	51.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	KKA	12 Bulan	54.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	KKA	12 Bulan	54.000.000,00
Pengadaan Barang/Jasa									
<b>Jumlah</b>				<b>47.720.733.386,00</b>					<b>52.151.000.000,00</b>

## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### **III.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

##### A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor

ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

#### B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

##### 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

##### 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

##### 3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

##### 4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

##### 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

### **III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Sekretariat Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Visi yang harus didukung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah :

***“Terwujudnya Kepulauan Anambas sebagai Daerah Otonom Maritim yang Berdaya Saing dalam Bidang Perikanan – Kelautan, Pariwisata, dan Pertambangan Berlandaskan Iman dan Taqwa”***

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Sekretariat Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas produk-produk perencanaaan dan kebijakan daerah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah, yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan aktifitas kegiatan keagamaan yang berkualitas	Meningkatnya pembinaan dan pelayanan umat
2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkesinambungan dengan berbasis perikanan dan pariwisata	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan
3	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang bersinergi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
		Meningkatnya harmonisasi produk hukum daerah
4	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2025)

### III.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan serta sub kegiatan Sekretariat Daerah lebih menitikberatkan pada terselenggaranya Pemerintahan yang baik sebagai upaya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sistematis. Dimana faktor

tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu “ Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Sebagai Fondasi Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan”.

Sebaran lokasi dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di ibukota Kabupaten, ini dikarenakan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah penetap Kebijakan dan membidangi urusan Pemerintahan Umum. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, juga berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:

- Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Sekretariat Daerah berkomitmen terhadap penerapan PUG dengan memberikan akses, peran/partisipasi, control dan manfaat antara laki – laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesenjangan / bias gender. Sejumlah aktivitas yang mencerminkan penerapan PUG diantaranya adalah dengan memberikan proporsi keterwakilan laki – laki dan perempuan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi

2. Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten
  3. Penyelenggaraan Ibadah Haji
  4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh
- **Kabupaten/Kota Sehat**

Perwujudan kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat dilakukan dengan menitik beratkan pada capaian indikator kegiatan KKS. Indikator – indikator kegiatan KKS tersebut tidak di alokasikan secara khusus tetapi lebih bersifat menumpang pada kegiatan yang ada, namun secara substansi, indikator – indikator tersebut harus termuat dalam kegiatan – kegiatan perangkat daerah. Sehubungan dengan tatanan KKS, dimana salah satunya adalah sarana dan prasarana umum, Sekretariat Daerah juga telah menerapkan wilayah kantor Sekretariat Daerah sebagai daerah bebas asap rokok sebagaimana Peraturan Bupati No. 49 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.
  - **Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA) dilakukan dengan memperhatikan sistem pembangunan yang berbasiskan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Sekretariat Daerah berupaya dalam proses perencanaan pembangunan terkait terhadap pencapaian indikator KLA. Salah satu yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah Pengadaan Alat Bermain Anak-anak di Taman Bermadah, sebagai fasilitas untuk bermain bagi anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.
  - **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)**

Dalam penerapan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah berupaya agar setiap program/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat di pertanggung jawabkan hasilnya kepada masyarakat. Sebagaimana di atur oleh permendagri 86 tahun 2017 pasal 170 ayat 2 bahwa sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah melalui bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan bersama inspektorat dan Balitbangpeda dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupaya agar mempedomani sasaran Renstra PD, agar setelah RKT tersusun, perjanjian kinerja kepala OPD dapat legal formalkan serta di jabarkan oleh unit kerja dibawahnya dalam menterjemahkan capaian yang diperjanjikan.
  - **Sustainable Developmen Goals (SDGs)**

Berkenaan dengan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Daerah juga telah berupaya dengan memuat tujuan dan indikator SDGs. Sejumlah tujuan SDGs menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, salah satu upaya dalam pencapaian tujuan SDGs

adalah pengurangan tingkat kemiskinan meskipun tanpa pengangguran khusus, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan penerapan zakat profesi pegawai, pembayaran zakat, infaq, dan sodakoh yang dihimpun UPZ diharapkan mampu memberikan keringanan bagi asnaf penerima ZIS. Sekretariat Daerah berkeyakinan bahwa jika budaya ini di lakukan secara masif, maka akan berdampak signifikan kepada penurunan angka kemiskinan.

Meskipun ada beberapa tanpa penganggaran kegiatan khusus, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah diupayakan dalam pencapaian target SDGs, KLA, PUG, KKS dan AKIP. Meskipun masih terdapat sejumlah kendala, kedepannya Sekretariat Daerah akan melakukan perbaikan – perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar target – target yang ingin dicapai dapat tercapai sebagaimana mestinya.

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Kode Rekening	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								
4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan			22.160.000.000,00				
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	12 Bulan	21.500.000.000,00	DAU		12 Bulan	21.500.000.000,00
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	12 Bulan	660.000.000,00	DAU		12 Bulan	660.000.000,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	230.000.000,00	DAU		12 Bulan	230.000.000,00
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	12 Bulan	230.000.000,00	DAU		12 Bulan	230.000.000,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Barang/ Jasa Rutinitas Perkantoran	KKA	12 Bulan	3.976.000.000,00	DAU		12 Bulan	3.976.000.000,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	12 Bulan	125.000.000,00	DAU		12 Bulan	125.000.000,00
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	12 Bulan	215.000.000,00	DAU		12 Bulan	215.000.000,00
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	12 Bulan	110.000.000,00	DAU		12 Bulan	110.000.000,00
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	12 Bulan	1.200.000.000,00	DAU		12 Bulan	1.200.000.000,00
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	12 Bulan	200.000.000,00	DAU		12 Bulan	200.000.000,00
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	12 Bulan	220.000.000,00	DAU		12 Bulan	220.000.000,00

4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pelayanan Kerja/Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah	KKA	12 Bulan	1.906.000.000,00	DAU		12 Bulan	1.906.000.000,00
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>300.000.000,00</b>
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	KKA	12 Bulan	300.000.000,00	DAU		12 Bulan	28.000.000,00
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>4.954.733.386,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>10.680.000.000,00</b>
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	12 Bulan	150.000.000,00	DAU		12 Bulan	150.000.000,00
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	12 Bulan	3.052.366.693,00	DAU		12 Bulan	1.598.000.000,00
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	12 Bulan	2.252.366.693,00	DAU		12 Bulan	1.700.000.000,00
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.315.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.115.000.000,00</b>
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	12 Bulan	315.000.000,00	DAU		12 Bulan	315.000.000,00
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	12 Bulan	150.000.000,00	DAU		12 Bulan	150.000.000,00
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	KKA	12 Bulan	200.000.000,00	DAU		12 Bulan	200.000.000,00
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	12 Bulan	650.000.000,00	DAU		12 Bulan	650.000.000,00
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>780.000.000,00</b>
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	220.000.000,00	DAU		12 Bulan	220.000.000,00

4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	120.000.000,00	DAU		12 Bulan	120.000.000,00
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	20.000.000,00	DAU		12 Bulan	20.000.000,00
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	420.000.000,00	DAU		12 Bulan	420.000.000,00
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.180.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>580.000.000,00</b>
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	160.000.000,00	Lainnya		12 Bulan	160.000.000,00
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	KKA	12 Bulan	120.000.000,00	Lainnya		12 Bulan	120.000.000,00
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	KKA	12 Bulan	900.000.000,00	Lainnya		12 Bulan	900.000.000,00
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Penataan Organisasi di Kab. Kepulauan Anambas</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>490.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>490.000.000,00</b>
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	KKA	12 Bulan	105.000.000,00	DAU		12 Bulan	105.000.000,00
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya kinerja aparatur	KKA	12 Bulan	100.000.000,00	DAU		12 Bulan	100.000.000,00
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Lakip Daerah	KKA	12 Bulan	285.000.000,00	DAU		12 Bulan	285.000.000,00
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>795.000.000,00</b>
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Terselenggaranya Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	KKA	12 Bulan	450.000.000,00	DAU		12 Bulan	233.000.000,00

4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	KKA	12 Bulan	400.000.000,00	DAU		12 Bulan	83.000.000,00
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terselenggaranya Peliputan dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	KKA	12 Bulan	350.000.000,00	DAU		12 Bulan	277.000.000,00
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>								
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>320.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>320.000.000,00</b>
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Administrasi Kewilayahan	KKA	12 Bulan	210.000.000,00	DAU		12 Kali	210.000.000,00
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Hari Besar	KKA	12 Kali	110.000.000,00	DAU		12 Kali	210.000.000,00
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	KKA	<b>12 Kali</b>	<b>7.400.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Kali</b>	<b>7.400.000.000,00</b>
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	KKA	1 dokumen	2.900.000.000,00	DAU		1 dokumen	2.900.000.000,00
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	KKA	12 Bulan	4.500.000.000,00	DAU		12 Bulan	4.500.000.000,00
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>1.245.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>1.155.000.000,00</b>
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Ranperda menjadi Perda Tersedianya Produk Hukum Kepala Daerah	KKA	3 Perda 12 Bulan	400.000.000,00	DAU		3 Perda 12 Bulan	400.000.000,00
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tersedianya Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	KKA	12 Bulan	610.000.000,00	DAU		12 Bulan	610.000.000,00
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	KKA	12 Bulan	145.000.000,00	DAU		12 Bulan	145.000.000,00
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>400.000.000,00</b>	DAU		<b>12 Bulan</b>	<b>400.000.000,00</b>

4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Regulasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD	KKA	1 BUMD dan BLUD	250.000.000,00	DAU		1 BUMD dan BLUD	250.000.000,00
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur dan Prasarana Lainnya Terkendalinya Inflasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	KKA	90 Persentase 1 Persentase	150.000.000,00	DAU		90 Persentase 1 Persentase	150.000.000,00
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>645.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>645.000.000,00</b>
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Persentase Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	KKA	30 OPD 100 Persen	45.000.000,00	DAU		30 OPD 100 Persen	45.000.000,00
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan Tahun 2021	KKA	4 Kali	600.000.000,00	DAU		4 Kali	600.000.000,00
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>970.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>970.000.000,00</b>
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Sistem Pengadaan/Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran (SIRUP dan TEPRA) Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	KKA	12 Bulan	420.000.000,00	DAU		12 Bulan	420.000.000,00
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Layanan LPSE Kabupaten Kepulauan Anambas yang Baik dan Efektif	KKA	12 Bulan	350.000.000,00	DAU		12 Bulan	350.000.000,00
4.01.03.2.03.03	Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	KKA	12 Bulan	200.000.000,00	DAU		12 Bulan	200.000.000,00
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Terkait Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	KKA	<b>12 Bulan</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>155.000.000,00</b>
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	KKA	12 Bulan	50.000.000,00	DAU			50.000.000,00
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	KKA	12 Bulan	51.000.000,00	DAU			51.000.000,00

4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	KKA	12 Bulan	54.000.000,00	DAU			54.000.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>47.720.733.386,00</b>				<b>52.151.000.000,00</b>

## BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.,

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 31 Januari 2025



**SAHTIAR, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740311 200212 1 005